



ISSN 2621-458X

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT STRATEGIC
PROGRAM IN BODDIE VILLAGE, MANDALLE DISTRICT, PANGKEP
DISTRICT**

**IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN PEMERINTAH
DESA DI DESA BODDIE KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN
PANGKEP**

Rahmi Rais
STIA Al Gazali Barru
rahmirais@algazali.ac.id
Dian Pratiwi
STIA Al Gazali Barru
dianpratiwi@algazali.ac.id
A.Ariyadi
STIA Al Gazali Barru
aariyadi@algazali.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine: Implementation of the Village Government Strategic Development Program in Boddie Village, Mandalle District, Pangkep Regency, using a qualitative research method whose data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. Well done In Boddie Village. The average score of respondents' opinions is 3.77 and the average percentage is 75.4, which means that the Village Head has implemented strategic village development programs well in the village.

Keywords: Program, village, strategy, government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Program Strategis Pembangunan Pemerintah Desa Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif yang teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan implementasi program strategis pembangunan telah dilaksanakan dengan baik Di Desa Boddie. Rata-rata nilai skor pendapat responden 3,77 dan rata-rata persentase 75.4 yang berarti Kepala Desa telah melaksanakan program-program strategis pembangunan desa dengan baik di desa tersebut.

Kata Kunci : Program,,desa,strategi,pemerintah



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Pemerintahan desa sekarang ini sudah diatur dengan Undang-Undang, yakni Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sebelum terbitnya Undang-Undang tersebut, Desa diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah yakni PP Nomor 72 tentang desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah mengatur kondisi normatif pembinaan pembangunan dan pemerintahan desa. Dikatakan kondisi normatif, karena di dalam undang-undang tersebut diharapkan seluruh desa secara normatif menyesuaikan kondisi di desa dengan kondisi pembangunan skala nasional.

Dengan demikian secara normatif, pembinaan dan pengembangan desa sebagaimana diatur di dalam peraturan tersebut, sehingga implementasi program strategis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa maka

Kepala Desa sebagai penanggung jawab pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Adapun pola strategis yang dilaksanakan Kepala Desa selaku kepala pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan adalah menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Lembaga tersebut dikenal sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan pola yang strategis itu, menjadikan kepala desa dalam melaksanakan fungsinya baik sebagai kepala pemerintah, sekaligus sebagai administrator pembangunan di wilayahnya. Pola strategis demikian menimbulkan semangat demokratisasi dalam pembangunan.

Hal tersebut mendorong demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat dan otonomi daerah sebagaimana terkandung di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah berupaya seoptimal mungkin melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Desa Boddie adalah salah satu Desa di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep yang sudah terbentuk Lembaga Pemberdayan Masyrakat (LPM) sebagai mitra Kepala Desa di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Desa tersebut adalah salah satu desa yang cukup berpotensi, terutama sumberdaya manusia yang cukup besar dan memiliki kemampuan kerja yang cukup baik.

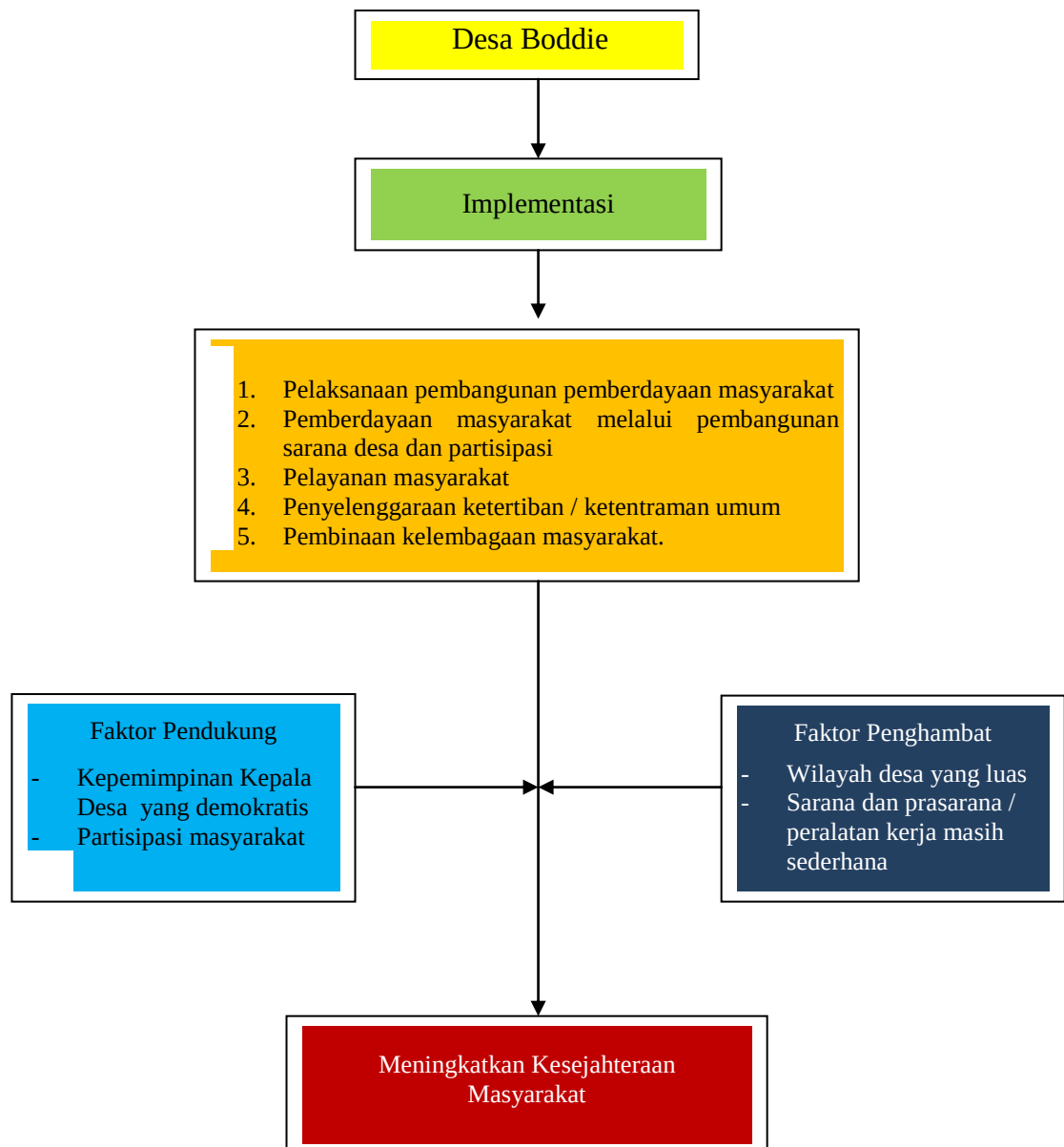
Mengingat bahwa Ketua dan pengurus LPM adalah tokoh masyarakat desa maka masyarakat diharapkan berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembuatan perencanaan terutama melalui musrembang desa yang dilaksanakan satu kali setiap tahunnya dan melaksanakan sendiri berbagai program yang telah disusun sendiri serta mengawasi sendiri pelaksanaan berbagai proyek-proyek pembangunan termasuk proyek-proyek yang dibiayai melalui APBD, termasuk di dalam menggali potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, yang kesemuanya itu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, maka Kepala Desa harus mampu mengimplementasikan seluruh program pembangunan yang strategis di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

Permasalahan utama yang terjadi di Desa Boddie Kecamatan Mandalle kabupaten Pangkep tentang Pembangunan Jalan Rabat Beton yang diprogramkan dan dianggarkan pemerintah desa tahun lalu sudah dikerjakan tapi hanya mencapai 70% dan anggaran tersebut sudah dicairkan sampai saat ini pembangunan tersebut belum dilanjutkan pekerjaannya sampai mencapai 100%, Namun anggaran Pembangunan tersebut sudah habis sementara kegiatan Fisik tidak selesai. Atas dasar masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi Program Strategis Pembangunan Pemerintah Desa Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep”.

Untuk lebih mudahnya mengetahui konsepsi tersebut di atas maka berikut ini penulis mengemukakan kerangka pikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009) bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2009), bahwa penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah

H.1 = Program strategis pembangunan berpengaruh terhadap implementasi (pelaksanaan) pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Boddie

H.0 = Program strategis pembangunan tidak berpengaruh terhadap implementasi (pelaksanaan) pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Boddie

B. METODE PENELITIAN

- **Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Saban Echdar (2017) penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan menguji hipotesis. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kuantitatif adalah penelitian bersifat linier, menggunakan statistik, yang menganalisis data yang diperoleh melalui angket.

Pada penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran terhadap variabel yang diteliti, yaitu Implementasi Program Strategis Pembangunan Pemerintah Desa di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

- **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan, yaitu mulai November 2019 s/d Februari 2022

- **Populasi dan Sampel**

1. **Populasi Penelitian**

Populasi menurut Saban Echdar (2017 : 261) adalah kumpulan obyek penelitian dari mana data akan dijaring atau dikumpulkan. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan obyek penelitian yakni aparatur pemerintah dan warga masyarakat Desa Boddie yang mengetahui masalah yang sedang dibahas, yakni pola strategis pemerintahan desa dalam menggali potensi masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis kegiatan di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

Populasi penelitian adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Tokoh Masyarakat yang mengetahui masalah di teliti, yang jumlah keseluruhannya sebanyak 54 orang.

2. Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2013) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Untuk melaksanakan penelitian dipilih sampel secara purposive yakni kepada mereka yang mengetahui permasalahan yang dibahas, yakni sebanyak 50% dari populasi, atau $50\% \times 54 \text{ orang} = 27 \text{ orang}$ sebagai sampel meliputi Kepala Desa, aparat kantor desa, Pengurus LPM dan Tokoh Masyarakat. Sampel tersebut sekaligus dijadikan sebagai responden penelitian.

Berhubung karena karakteristik populasi bersifat homogen maka untuk keperluan pengumpulan data lapangan maka penulis menetapkan dan mengambil sampel secara purposive sebanyak 27 orang yang diharapkan sudah dapat mewakili populasi. Adapun perincian populasi adalah :

1. Kepala Desa	1 orang
2. Sekretaris Desa	1 orang
3. Perangkat Desa	14 orang
4. Kepala Dusun	2 orang
5. Tokoh Masyarakat	<u>9 orang</u>
Jumlah sampel penelitian	27 orang

Sampel yang terpilih sekaligus dijadikan sebagai responden penelitian. Untuk melengkapi hasil angket maka sebagian responden dijadikan sebagai nara sumber atau informan wawancara.

- **Jenis dan Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2009) teknik analisis data penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua jenis data, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan sumber data terutama berasal dari data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran angket kepada sampel atau responden, sedangkan data sekunder sebagai pelengkap untuk menganalisis data primer secara deskriptif, diperoleh melalui wawancara.

- **Teknik Pengumpulan Data**

1. Angket

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket, yang disebarkan kepada seluruh responden yang telah ditentukan sebelumnya. Angket (kuesioner) yang diedarkan disiapkan jawaban untuk dipilih oleh responden sesuai keadaan sebenarnya.

Pemberian skor untuk masing-masing alternatif jawaban yang ada dalam angket, sebagai berikut :

- Pilihan jawaban a : sangat aktif, skornya 5
- Pilihan jawaban b : aktif, skornya 4
- Pilihan jawaban c : cukup aktif, skornya 3
- Pilihan jawaban d : kurang aktif, skornya 2
- Pilihan jawaban e : tidak aktif, skornya 1

2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara bebas dan terpimpin sehingga responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengemukakan jawaban bebas, kemudian penulis memilah-milah atau memperivikasi data yang relevan.

Untuk keperluan analisis data maka jawaban hasil wawancara dijadikan bahan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket.

3. Observasi

Observasi yang digunakan adalah penulis langsung membaur, bergaul, dan berkomunikasi dengan pegawai kantor desa dan pengurus LPM, untuk mengadakan pengamatan, memperoleh informasi yang sangat berharga dalam rangka pembahasan masalah penelitian, terutama untuk mengetahui Implementasi Program Strategis Pembangunan Pemerintah Desa di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian, atau sebagai pelengkap penelitian ini, yaitu kedaan georgafis dan demografis desa dan catatan-catatan yang diperlukan dalam pembahasan hasil penelitian.

- **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara mempresentasikan jawaban pada setiap hasil angket, untuk mengetahui implementasi Program Strategis Pembangunan Pemerintah Desa di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

Untuk data yang telah diolah dan dinilai dengan cara mentabulasi setiap jawaban yang diberikan responden kemudian dianalisis secara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase dan kategorisasi, yang disajikan pada tabel frekuensi. Rumus persentase yang digunakan sebagai berikut :

$$\begin{array}{ll}
 \text{Nilai} & : \text{Bobot} \times \text{Frekuensi} \\
 \text{Rata-rata Skor} & : \frac{\sum \text{Nilai}}{N} \\
 \text{Persentase} & : F / N \times 100 \% \\
 \text{Rata-rata Persen} & : \frac{\text{Rata-rata Skor}}{\text{Banyaknya Kualifikasi}} \times 100\%
 \end{array}$$

Hasil yang diperoleh dikategorikan penilaiannya (dalam hal ini program strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dalam hipotesis penelitian) yakni sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Sangat aktif | : Rata-rata skor : 4,36 – 5,00
: Rata-rata persen : 85,20% – 100% |
| 2. Aktif | : Rata-rata skor : 3,51 – 4,35
: Rata-rata persen : 70,20% – 85,00% |
| 3. Cukup aktif | : Rata-rata skor : 2,76 – 3,50
: Rata-rata persen : 55,20% – 70,00% |
| 4. Kurang aktif | : Rata-rata skor : 2,01 – 2,75
: Rata-rata persen : 40,20% – 55,00% |
| 5. Tidak aktif | : Rata-rata skor : 1,26 – 2,00
: Rata-rata persen : 25,20% – 40,00% |

Analisis Uji Hipotesis menggunakan SPSS

Pengolahan data untuk menguji hipotesis, melalui analisa Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan olah data melalui SPSS. Hasil olah data melalui SPSS menjadi lampiran pada skripsi ini.

- **Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pola strategis pemerintahan kelurahan dalam menggali potensi masyarakat terutama di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membahas variabel maka ada 5 (lima) indikator yang akan diukur, yakni :

1. Pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat
 - Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
 - Pelaksanaan Administrasi Kependudukan
2. Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana dan partisipasi
 - Melaksanakan program pembangunan sarana jalan
 - Mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usahanya
3. Pelayanan Masyarakat
 - Memberikan pelayanan masyarakat di kantor desa
 - Koordinator pelaksanaan pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketertiban/ketentraman umum
 - Mendirikan Poskamling di setiap Dusun Pemukiman
 - Memberikan penyuluhan Kantibmas
5. Pembinaan kelembagaan masyarakat
 - Mendorong LPM melaksanakan pembinaan masyarakat

- Mendorong Tim Penggerak PKK Desa dalam memberdayakan perempuan

6. Faktor mempengaruhi

a. Faktor Pendukung

- Kepemimpinan Kepala Desa yang demokratis
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam penggalan potensi masyarakat cukup tinggi.

b. Faktor Penghambat

- Wilayah desa cukup luas untuk dijangkau dalam waktu singkat
- Sarana dan prasana / peralatan kerja kantor desa masih sederhana, sehingga masih sulit dengan cepat melaksanakan program kerja sebagaimana diharapkan.

C .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi program strategis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa di Desa Boddie secara garis besar terdiri dari

- a. Pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat
- b. Pemberdayaan masyarakat,
- c. Pelayanan masyarakat,
- d. Penyelenggaraan ketertiban / ketentraman umum, dan
- e. Pembinaan kelembagaan masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat

Implementasi program strategis pembangunan pemerintahan desa yang dilaksanakan di Desa Boddie terdiri dari :

- a. Pembangunan pemberdayaan masyarakat

Desa Boddie adalah salah satu desa di kabupaten Pangkep, oleh karena itu pemerintah Desa Boddie melaksanakan pembangunan pemberdayaan masyarakat yang telah dilimpahkan kepada desa dan menjadi tanggungjawab Kepala Desa untuk melaksanakannya.

Bentuk-bentuk kegiatan implementasi program strategis pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa, yang dipimpin Kepala Desa di Desa Boddie antara lain adalah : (1) perencanaan pembangunan desa, (2) pengawasan tata ruang di wilayah kerjanya, (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) penyediaan sarana dan prasarana umum, (5) penanggulangan masalah

sosial, (6) membantu pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; (7) pengendalian lingkungan hidup; (8) rekomendasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (9) pelayanan administrasi umum pemerintahan, dan (10) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang Kepala Desa Boddie dalam pemberdayaan masyarakat maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 1. Fungsi Kepala Desa Boddie dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	4	20	15
2	Aktif	4	11	44	41
3	Cukup aktif	3	9	27	33
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	97	100
	Rata-rata			3,6	72%

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa telah aktif melaksanakan fungsinya dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat di Desa Boddie (rata-rata 3,6) dengan katagori "aktif", dengan mencapai 72% dari yang diharapkan.

b. Pemberdayaan melalui pembinaan administrasi kependudukan

Salah satu fungsi Kepala Desa di Desa Boddie adalah penataan administrasi kependudukan. Kantor Desa adalah pangkalan data kependudukan sehingga wajib bagi pemerintah desa untuk melaksanakan administrasi kependudukan, dengan terus mendata penduduk yang ada di wilayahnya, dan mencatatnya dengan baik untuk

bahan pelaporan kepada Pemerintah Daerah kabupaten melalui Camat, yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang pemberdayaan melalui pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 2. Fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan administrasi kependudukan di Desa Boddie

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	7	35	26
2	Aktif	4	13	52	48
3	Cukup aktif	3	4	12	15
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	105	100
	Rata-rata			3,9	78%

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa telah aktif melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan administrasi kependudukan (rata-rata 3,9) dengan katagori ”aktif”, dengan mencapai 78%) dari yang diharapkan.

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana desa dan partisipasi.

a. Program pembangunan sarana jalan

Salah satu kriteria semakin meningkatnya pemberdayaan warga adalah ditandai oleh semakin meningkatnya pendapatan warga, yang ditandai semakin mampunya menyekolahkan anak-anaknya, pemilihan kendaraan pribadi, penataan rumah yang semakin baik dan sehat.

Dalam mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat maka salah satu fungsi yang menonjol adalah selalu memprogramkan

perbaikan jalan yang menjadi akses warga masyarakat untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan untuk mengangkut produksi pertanian dan produksi lainnya yang digeluti oleh warga. Semakin baik jalan, maka pengangkutan hasil produksi pertanian dapat lebih mudah dijangkau menuju pusat-pusat pemasaran.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang upaya Kepala Desa di dalam memprogramkan perbaikan jalan melalui anggaran dari APBD kabupaten maka dapat dilihat pendapat responden sebagaimana pada tabel di bawah ini;

Tabel: 3. Fungsi Kepala Desa dalam memprogramkan perbaikan jalan Lingkungan / dusun Desa Boddie

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	4	20	15
2	Aktif	4	16	64	59
3	Cukup aktif	3	4	12	15
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	102	100
	Rata-rata			3,8	76 %

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa aktif memprogramkan perbaikan jalan Lingkungan / Dusun dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Boddie (rata-rata 3,8) dengan katagori "aktif", dan mencapai 76% dari yang diharapkan.

b. Partisipasi peningkatan usaha warga

Dalam melaksanakan usaha warga maka masyarakat membutuhkan izin usaha dari Pemerintah Daerah dengan rekomendasi dari Kepala Desa. Untuk melancarkan urusan warga dalam mengurus izin usaha, maka Kepala Desa memberikan kemudahan pemberian

rekomendasi kepada warga yang berminat mengurus izin usaha, sebagai bentuk partisipasi Kepala Desa dalam mendorong warga meningkatkan kegiatan usahanya.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang partisipasi Kepala Desa di dalam memberikan rekomendasi pengurusan izin usaha maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 4 Fungsi Kepala Desa dalam mendorong kegiatan usaha warga

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	6	30	22
2	Aktif	4	11	44	41
3	Cukup aktif	3	7	21	26
4	Kurang aktif	2	30	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	101	100
	Rata-rata			3,7	74 %

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa aktif memberikan rekomendasi pembukaan usaha warga / pengurusan izin usaha yang diurus pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal kabupaten Pangkep (rata-rata 3,7) dengan katagori "aktif", dan mencapai 74% dari yang diharapkan.

3. Pelayanan Masyarakat

a. Pelayanan masyarakat di kantor desa

Berbagai bentuk keperluan masyarakat di kantor Desa Boddie, dan mengharapkan adanya pelayanan yang baik dari aparaturnya Pemerintah Desa.

Untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih cepat dan lebih baik, maka Kepala Desa sebagai aparaturnya pemerintah

senantiasa mendorong dan meningkatkan disiplin kepada aparat desa untuk memberikan pelayanan prima kepada warga yang memerlukan bantuan, terutama pembuatan rekomendasi, surat keterangan, dan berbagai bentuk surat-surat yang dibutuhkan warga.

Untuk mengetahui pendapat responden maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 5. Fungsi Kepala Desa dalam memberikan pelayanan warga di kantor Desa

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	6	30	22
2	Aktif	4	13	52	48
3	Cukup aktif	3	5	15	19
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	103	100
	Rata-rata			3,8	76%

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa aktif melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kantor Desa Boddie (rata-rata 3,8) dengan katagori "aktif", dan mencapai 76% dari yang diharapkan.

b. Koordinator pelaksanaan pelayanan masyarakat

Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan, yang berfungsi sebagai koordinator beberapa bentuk pelayanan masyarakat, yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang melaksanakan pelayanan. Bahkan lembaga-lembaga pelayanan harus bekerjasama Kepala Desa dalam pemberian pelayanan. Misalnya pelayanan yang diberikan oleh Posyandu dalam pelayanan kesehatan, BKKBN dalam pelayanan KB, kegiatan PKK dalam pelayanan

pemberdayaan keluarga (perempuan), Bimnas dan Babinsa dalam pemberian pelayanan kemanan, Kantibmas, dan berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan instansi vertikal di kantor desa.

Untuk mengetahui pendapat responden maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 6. Fungsi Kepala Desa dalam mengkoordinir pelayanan masyarakat

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	5	25	19
2	Aktif	4	14	56	51
3	Cukup aktif	3	5	15	18
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	102	100
	Rata-rata			3,8	76 %

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kepala desa aktif melaksanakan fungsinya dalam mengkoordinir pelayanan masyarakat di Desa Boddie (rata-rata 3,8) dengan katagori "aktif" dan mencapai 76% dari yang diharapkan.

4. Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat / Ketentaman Umum

a. Mengaktifkan kegiatan Poskamling

Untuk membina dan meningkatkan kerukunan bermasyarakat maka diperlukan adanya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu salah satu kebutuhan masyarakat di dalam membina ketertiban dan kerukunan adalah terciptanya keamanan dan ketertiban (Kantibmas) yang baik dan kondusif.

Upaya Kepala Desa Boddie untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin baik adalah mendorong warga

masyarakat untuk melaksanakan Siskamling dengan menempatkan Poskamling sebagai pusat kegiatan jaga malam. Kegiatan Siskamling dilaksanakan di pusat pemukiman yang dianggap rawan keamanan, bukan hanya pencurian tetapi keributan akibat sering ada warga yang melakukan perbuatan mengganggu ketenangan dan ketertiban warga yang sedang istirahat di waktu malam hari.

Kegiatan Siskamling dilaksanakan diseluruh dusun yang ada dalam wilayah Desa Boddie, sehingga disetiap Dusun didirikan satu atau dua Poskamling sebagai pusat jaga malam.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang upaya kepala desa dalam mendorong warga masyarakat melaksanakan kegiatan Siskamling di Desa Boddie, maka penulis mengemukakan dalam bentuk tabel frekuensi.

Tabel: 7. Fungsi Kepala Desa dalam mendorong kegiatan Siskamling.

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	4	20	
2	Aktif	4	17	68	
3	Cukup aktif	3	5	15	
4	Kurang aktif	2	1	2	
5	Tidak aktif	1	0	0	
N = 27	Jumlah		27	105	100
	Rata-rata			3,9	78 %

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kepala desa aktif mendorong warga masyarakat dalam melaksanakan Siskamling di setiap dusun dalam wilayah Desa Boddie (rata-rata pendapat responden adalah 3,9 dengan katagoti "aktif" dan mencapai perolehan 78% dari yang di harapkan.

b. Penyuluhan Kantibmas

Untuk mendorong masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan Siskamling maka Kepala Desa bersama dengan Binmas dan Babinsa memberikan ceramah pentingnya masyarakat terlibat di dalam kegiatan Siskamling untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang lebih baik.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang pengaruh ceramah / penyuluhan Kantibmas maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 8. Fungsi Kepala Desa dalam memberikan penyuluhan dan ceramah dalam mendorong masyarakat melaksanakan Siskamling.

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	3	15	11
2	Aktif	4	11	44	41
3	Cukup aktif	3	9	27	33
4	Kurang aktif	2	4	8	15
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	94	100
	Rata-rata			3,5	70 %

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa cukup aktif memberikan penyuluhan dan ceramah di Siskamling agar masyarakat bersedia melaksanakan Siskamling di setiap dusun / lingkungan pemukiman masing-masing, rata-rata pendapat responden (3,5) dengan kategori "cukup aktif", dan mencapai (70%) dari yang diharapkan.

5. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

a. Kerjasama LPM membina masyarakat

Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Boddie sebagai mitra kerja. Oleh karena itu program kerja LPM dipadukan program pemerintah di dalam pembinaan kelembagaan dalam masyarakat.

Di Desa Boddie terdapat beberapa lembaga-lembaga masyarakat yang memerlukan pembinaan. Baik yang bergerak dibidang keagamaan, kepemudaan, remaja, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Di bidang Keagamaan, maka di setiap Masjid terdapat panitia pembangunan dan juga Remaja Masjid, yang aktif melaksanakan pembinaan jamaah. Di bidang kesehatan terdapat beberapa Posyandu yang melakukan pelayanan kesehatan di setiap Lingkungan, Bahkan di Wilayah Desa Boddie terdapat Koperasi yang membina anggotanya dalam beberapa bentuk usaha.

Kepala Desa sebagai kepala pemerintah yang paling bawah dan dekat dengan masyarakat dan LPM sebagai lembaga pembangunan dan kemasyarakatan berfungsi untuk mendorong lembaga masyarakat untuk membina anggotanya. Oleh karena itu Kepala Desa dan LPM senantiasa menjalin kerjasama dan saling melakukan koordinasi dalam upaya pembinaan masyarakat.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang pelaksanaan fungsi Kepala Desa di dalam mendorong lembaga kemasyarakatan

membina masyarakat maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 9. Fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	5	25	19
2	Aktif	4	13	52	48
3	Cukup aktif	3	6	18	22
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	101	100
	Rata-rata			3,7	74%

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa aktif melaksanakan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan masyarakat di Desa Boddie, yakni rata-rata pendapat responden (3,7) dengan katagori "aktif" dan mencapai 74% dari yang diharapkan.

b. Kerjasama Tim Penggerak PKK

Kepala Desa di dalam memberikan pembinaan pemberdayaan perempuan dengan bekerjasama Tim Penggerak PKK Kantor Desa sebagai mitra kerja.

Tim Penggerak PKK Kantor Desa di dalam melaksanakan program POKJA mendapat dana pembinaan dari pemerintah daerah melalui Anggaran dana Kantor Desa. Dengan demikian PKK Kantor Desa dapat melaksanakan program kerja POKJA untuk membina dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang fungsi Kepala Desa di dalam mendorong PKK melaksanakan pembinaan dan

peningkatan kesejahteraan keluarga maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 10. Fungsi Kepala Desa dalam mendorong PKK melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga.

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	7	35	26
2	Aktif	4	15	60	55
3	Cukup aktif	3	4	12	15
4	Kurang aktif	2	1	2	4
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	109	100
	Rata-rata			4,0	80%

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa aktif melaksanakan pembinaan PKK pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan rata-rata (4,0) dengan katagori "aktif" dan mencapai 80% dari yang diharapkan.

Setelah dilaksanakan analisis tentang implementasi program strategis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Boddie yang dikoordinir langsung Kepala Desa yang meliputi 5 kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan pendapat responden dalam suatu tabel frekuensi sebagai berikut:

Tabel 11 : Implementasi program strategis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Boddie dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No.	Indikator	Nilai Skor	Persen tase
Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat :			
1	Pembangunan pemberdayaan masyarakat	3,6	72
2	Pemberdayan masyarakat melalui pembinaan administrasi Kependudukan	3,9	78
Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana desa dan partisipasi :			
1	Program Pembangunan jalan lingkungan	3,8	76
2	Partisipasi peningkatan usaha warga	3,7	74
Pelayanan Masyarakat :			
1	Pelayanan masyarakat di Kantor Desa	3,8	76
2	Koordinator pelayanan masyarakat	3,8	76
Penyelenggaraan ketertiban / ketentraman umum:			
1	Mengaktifkan kegiatan Poskamling	3,9	78
2	Penyuluhan Kantibmas	3,5	70
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat :			
1	Kerjasama LPM membina masyarakat	3,7	74
2	Kerjasama PKK memberdayakan perempuan	4,0	80
Jumlah		37,7	754
Rata-rata		3,77	75,4

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa rata-rata nilai skor pendapat responden 3,77 dan rata-rata persentase 75.4 dari yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi program strategis pembangunan telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Boddie bersama warga masyarakat yang dikoordinir langsung Kepala Desa.

Uji Hipotesis (Regressi)

Untuk mengetahui apakah program strategis pembangunan yang sudah disusun oleh pemerintah desa berpengaruh terhadap implementasi

(pelaksanaan) pembangunan desa di Desa Boddie, maka dapat dianalisis dengan secara Regressi dengan menggunakan analisis SPSS.

Untuk menguji Hipotesis sebagaimana telah di tetapkan sebelumnya, yaitu ;

H.1 = Program strategis pembangunan berpengaruh terhadap implementasi (pelaksanaan) pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Boddie dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

H.0 = Program strategis pembangunan tidak berpengaruh terhadap implementasi (pelaksanaan) pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Boddie dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dimana X = Implementasi Program Strategis Pembangunan

Y = Pelaksanaan Program Pemerintah Desa.

Hasil dari uji Statistik Regresi menggunakan SPSS menunjukkan bahwa implementasi program strategis pembangunan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan desa, hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,533 (nilai Regresi) dan nilai signifikan $0.001 < 0.005$ (dapat diterima) pada table Correlations dan Model Summary di bawah ini.

Correlations

		Program Pemerin Desa (Y)	Impl.Program Stratg (X)
Pearson Correlation	Program Pemerin Desa (Y)	1,000	,553
	Impl.Program Stratg (X)	,553	1,000
Sig. (1-tailed)	Program Pemerin Desa (Y)	.	,001
	Impl.Program Stratg (X)	,001	.
N	Program Pemerin Desa (Y)	27	27
	Impl.Program Stratg (X)	27	27

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,553 ^a	,306	,278	1,414	,306	11,009

Model Summary ^b				
Model	df1	df2	Sig. F Change	
1	1	25	,003	1,697

a. Predictors: (Constant), Impl.Program Stratg (X)

b. Dependent Variable: Program Pemerin Desa (Y)

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS, maka diketahui bahwa nilai Regressi 0.553 adalah semakin mendekati 1.00, dan nilai signifikan 0.001 lebih kecil dari 0.005 ($0.001 < 0.005$) dan $t_{hit} : 2318 > 1703 t_{tab}$ sehingga hipotesa (H.1) dapat diterima secara signifikan, yakni program strategis pembangunan berpengaruh terhadap implementasi (pelaksanaan) pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Boddie dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya ada pengaruh yang sangat signifikan program strategis pembangunan desa, dengan pelaksanaan (implementasi) kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dikoordinir oleh Kepala Desa di Desa Boddie, program strategis yang terdiri dari (a) pelaksanaan kegiatan pemerintahan keKepala Desa, (b) pemberdayaan masyarakat, (c) pelayanan masyarakat, (d) penyelenggaraan ketertiban / ketentraman umum, dan (e) pembinaan kelembagaan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Boddie.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

- **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan implementasi program strategis pembangunan telah dilaksanakan dengan baik Di Desa Boddie. Rata-rata nilai skor pendapat responden 3,77 dan rata-rata persentase 75.4 yang berarti Kepala Desa telah melaksanakan program-program strategis pembangunan desa dengan baik di desa tersebut.

- **Saran-Saran**

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi program strategis pembangunan telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Boddie bersama warga masyarakat yang dikoordinir langsung Kepala Desa. Disarankan agar pemerintah Desa Boddie agar lebih meningkatkan fungsinya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Disarankan agar Kepala Desa meningkatkan peranannya di dalam pelaksanaan pembangunan dan mengerakkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, dengan tetap melaksanakan Musrembang, melibatkan warga dusun / lingkungan sampai Musrembang tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Purnami Wulandari. 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kabupaten Purbalingga*, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan UNY Yogyakarta,
- Bintaro, 2011, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Yogyakarta, Penerbit Galia Indonesia
- Hanif Norcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga
- Martiana Dewi Rahayu, 2018, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Saban Echdar, H, 2017, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, Jakarta, Bogor, Ghalia Indonesia
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Cetakan ke-7, Alfabeta
- , 2013, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Cetakan ke-7, Alfabeta
- Sukmawati, 2015, *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrembang di Desa Mandalle Kabupaten Pangkep*, Skripsi STIA AG Barru
- Sunit Agus Tricahyono, 2008, *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Propinsi NTT*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Sunyoto Usman, 2010, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Totok dan Poerwoko, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

Tresia, Aprilia, dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Penerbit Alfabeta

Siagian, P. Sondang, 2017, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wahab, Abdul, Solichin, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Universitas Muhammadiyah, Malang, Press

Dokumentasi

Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Undang-undang No. 23 tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam negeri RI No. 114 Tahun 2014, tentang *Pedoman Pembangunan Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang *Desa*

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Prioritas Pemnggunaan Dana Desa*.